



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

KAWASAN MANGROVE BAROS: Pengunjung menaiki papan 'stand up paddle' di kawasan Mangrove Baros, Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Jumat (13/1). Kawasan mangrove yang berada di muara Sungai Opak tersebut berfungsi sebagai penahan laju abrasi saat terjadi gelombang tinggi di Pesisir Selatan.

MAHASISWA KESULITAN BAYAR UKT

Segera Komunikasikan dengan Kampus

YOGYA (KR) - Sekda DIY K Baskara Aji prihatin mendengar kabar adanya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan mahasiswa angkatan 2020 itu tidak bisa membayar UKT sampai akhir hayatnya karena sakit hipertensi. Kejadian itu pun viral di media sosial sejak 11 Januari 2023 lalu.

Baskara Aji mengaku prihatin. Karena itu, ia pun minta kepada pihak-pihak yang mengetahui jika ada mahasiswa sedang mengalami kesulitan sebaiknya segera mengkomunikasikannya dengan pihak kampus. Jangan sampai mahasiswa yang kuliah di DIY putus kuliah akibat persoalan ekonomi (tidak bisa membayar kuliah).

"Saya kira kalau sampai ada mahasiswa yang seperti ini harus diantisipasi. Mahasiswa yang bersangkutan atau siapa pun yang mengetahui sebaiknya segera berkomu-

nikasi dengan kampus. Mereka bisa saja kirim surat atau lewat mana pun. Karena untuk mahasiswa korban gempa Cianjur saja, Pemda DIY memberikan bantuan, masak ada masalah mahasiswa tidak bisa bayar kuliah tidak dibantu? Ini yang harus jadi perhatian," tandas Sekda DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/1). Baskara Aji mengatakan, kasus yang dialami mahasiswa UNY itu menjadikan Pemda DIY mewacanakan untuk membuka opsi pemberian beasiswa. Karena beberapa tahun lalu Pemda DIY memiliki pro-

gram beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di DIY. Namun, karena kewenangan dalam memberikan beasiswa bagi mahasiswa berada di Pemerintah Pusat, hal itu sempat dihentikan. Pasalnya beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dinilai sudah banyak jenisnya. Meski begitu jika beasiswa dari Pemerintah Pusat belum mencakup, tidak menutup kemungkinan ke depan bisa saja beasiswa dari Pemda kembali diberikan. "Seandainya nanti dari analisis yang dilakukan, beasiswa itu dinilai masih dibutuhkan. Bisa saja beasiswa itu kembali dihidupkan untuk mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu dengan menggunakan dana APBD. Dulu dihentikan karena beasiswa untuk kampus difokuskan dari Pemerintah Pusat. Sementara Pemda DIY sesuai kewenangan diminta fokus ke SMA/SMK dan SLB," terangnya. **(Ria)-d**

ANCAM TURUN KE JALAN

Nelayan Pati Demo Tolak PNBP 10 Persen

PATI (KR) - Ribuan nelayan Kabupaten Pati Jateng kembali menggelar demo untuk menolak pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10%. Menariknya, pendemo malah membawa sumbangan untuk para korban banjir, Jumat (13/1).

Logistik sumbangan pendemo diterima Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro ST MT, yang kemudian diserahkan Ketua Pemuda Ansor, Abdulah Syafi. Sumbangan berupa beras 1 ton (ukuran 2,5 kg), beras ukuran 5 kg sebanyak 10 plastik, beras isi 10 kg sebanyak 2 bungkus, minyak goreng 20 liter sebanyak 10 jerigen, susu 10 dos, mi 364 karton, krupuk 25 kg, dan obat anti



KR-Alwi Alaydrus

Aksi demo nelayan Pati yang meminta agar PNBP 10 persen diturunkan.

masuk angin 10 pak.

Selain menolak pajak PNBP 10 persen, pendemo juga menuntut perluasan wilayah tangkapan di wilayah WPP NRI. Untuk mengungkap tuntutananya, nelayan membawa spanduk dan ribuan poster yang

berisi berbagai macam tuntutan nelayan.

Koordinator demo, Hadi Sutrisno SE mengatakan, aksi nelayan kali ini merupakan puncak kemarahan nelayan karena semakin ditekan. Nelayan menuntut pajak PNBP diturunkan di

bawah 5 persen. "Nasib nelayan saat ini merasa dipersulit oleh pemerintah. Ini ditandai dengan adanya kebijakan yang tidak pro nelayan. Kami akan turun ke jalan lagi, jika tuntutan tidak digubris oleh kementerian kelautan dan perikanan," tandasnya.

Diungkapkan Hadi, dalam Peraturan Presiden (PP) No 85 tahun 2021 ada kejahatan pola pikir pemerintah untuk menindas para nelayan. Sehingga dia mengajak para nelayan untuk mendobrak runtuhnya moral pejabat pemerintah tersebut. "Peraturan tersebut adalah kewenangan pusat, tapi para nelayan berharap Pemkab Pati dan DPRD kiranya bisa menjembatani para nelayan" ucapnya. **(Cuk)-f**

MENGAKU SUDAH TUA

Ma'ruf Amin Tak Maju Lagi di Pilpres 2024

JAKARTA (KR) - Wapres Ma'ruf Amin menegaskan dirinya tidak akan maju lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ma'ruf mengaku sudah cukup tua untuk kemudian memutuskan maju kembali pada pilpres mendatang.

"Saya sudah tua, umur sudah masuk hampir 80. Bulan Maret 80 (tahun)," kata Wapres usai menghadiri acara Ijtima Ulama Nusantara yang digagas Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Jumat (13/1).

Menurutnya, kesempatan pilpres mendatang sebaiknya diberikan kepada tokoh yang lebih muda. "Saya ini sudah cukup tua lah. Harus sudah memberikan kesempatan kepada yang lebih muda," ujarnya.

Sementara mengenai sosok capres atau cawapres pilihannya pada pilpres mendatang, Ma'ruf mengatakan bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan partai politik atau gabungan partai politik. "Capres itu kewenangan di parpol. Oleh karena itu, saya sesuai aturan main saja, nanti partai pilih seperti apa, yang penting sesuai aturan main," jelasnya.

Ma'ruf meyakini siapa pun capres atau cawapres pilihan parpol, sosoknya pasti akan dipilih yang memperoleh simpati pu-

blik. "Tapi, sampai hari ini belum ada calon yang fix, yang definitif, masih diayak," tambahnya.

Sementara itu, PKB mengharapkan Ijtima Ulama Nusantara dapat mengeluarkan fatwa haram untuk tindakan politik uang pada Pemilihan Umum 2024. "Larangan politik uang, mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terkena politik uang. Artinya mengeluarkan fatwa haram," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, tindakan politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu juga akan tercederai. "Harapan kami, doa restu, tausiyyah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dari dalam Ijtima Ulama Nusantara agar meneguhkan kembali hukumnya (haram) menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum," katanya.

Penegasan tersebut, kata Muhaimin, terutama pada mubaligh-mubaligh untuk secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jemaah, pada seluruh umat, masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi politik uang. **(Ant/Has)-f**

Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers 2022-2025

JAKARTA (KR) - Dr Ninik Rahayu terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025 melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (13/1).

"Kemerdekaan pers harus terus-menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kerja multi-stakeholders," ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025, di Jakarta.

Penetapan ini untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022. Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers.

Sehari-hari, ia aktif sebagai Pengajar Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi dan Diklat Pendidikan Hukum Kantor dan

Lembaga sejak 1987 hingga saat ini. Selain itu, Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2006-2009 dan 2010-2014, Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi. Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Dalam rapat pleno Anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lainnya. Pertama, menyetujui Asep Setiawan sebagai Anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022-2025. Kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Sidang pleno Anggota Dewan Pers untuk menetapkan Ketua Dewan Pers dan perubahan atas Statuta 2016 ini dihadiri secara luring dan daring oleh Anggota Dewan Pers. **(Ant)-d**

KEMENTERIAN PPPA

Soroti Dispensasi Perkawinan Anak

JAKARTA (KR) - Kasus ratusan dispensasi kawin anak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang terjadi akibat hamil di luar nikah, disorot Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Menteri PPPA menegaskan, perkawinan anak memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Di satu sisi, perkawinan anak merusak masa depan anak itu sendiri dan akan menggerus cita cita bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing.

"Perkawinan anak memicu tingginya angka putus sekolah dan dari sisi kesehatan rentan terjadinya kematian ibu melahirkan, anemia, ketidaksiapan mental dan juga terjadinya malnutrisi," jelas Bintang Puspayoga di Jakarta, Jumat (13/1).

Dari sisi ekonomi, lanjutnya, anak yang menikah pada usia masih tergolong anak terpaksa harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah, sehingga kemiskinan ekstrem akan terus berlanjut. Belum lagi dengan ketidaksiapan fisik dan mental akan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

"Karena itu, perkawinan anak tidak boleh terjadi lagi. Selain melanggar hak anak, juga melanggar hak asasi manusia. Saat ini Pemerintah juga sedang mengatur mekanisme untuk pengetatan dispensasi kawin agar tidak dengan mudah untuk diperoleh," tegas Menteri PPPA.

Kabupaten Ponorogo masih mencatatkan perkawinan anak yang tinggi. Pada 2020 mencapai 241 kasus dispensasi kawin anak, naik menjadi 266 kasus pada 2021. Pada 2022, kasus dispensasi kawin anak mengalami penurunan menjadi 191 kasus.

"Kita mengapresiasi menurunnya kasus dispensasi kawin anak, yang memerlukan semua pihak berupaya keras untuk mencegah bertambahnya angka perkawinan anak di Ponorogo. Untuk itu, saya meminta semua pihak, kementerian, lembaga, Pemerintah Povinsi/Kabupaten/Kota, orangtua, pendidik dan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, media, dan semua masyarakat mari bahu-membahu untuk terus melakukan upaya pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi," kata Menteri PPPA. **(Ati)-f**

TIGA KALI TERTANGKAP

Revaldo Tersangka Kasus Narkotika



KR-Antara/Galih Pradipta

Aktor Revaldo Fifaldi Suria Permana (kiri) dihadirkan saat rilis kasus narkoba di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/1).

2022 dengan frekuensi empat kali dalam sepekan.

Dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti antara lain tiga plastik klip berisi ganja masing-masing seberat 0,51 gram,

0,33 gram dan 0,39 gram, serta dua butir pil ekstasi.

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada Revaldo yakni Pasal 111 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) subsidiar pasal 127 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Penangkapan ini menjadi ketiga kalinya Revaldo berurusan dengan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Revaldo pertama kali ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jaksel pada 10 April 2006. Yang bersangkutan kemudian menjalani proses hukum dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kemudian pada 20 Juli 2010 yang bersangkutan kembali ditangkap oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. **(Ant/Has)-f**